









































itu, peran partai politik merosot sama sekali.

Dalam Demokrasi Terpimpin, panggung politik Indonesia praktis dikuasai oleh kekuatan tiga aktor politik: Sukarno, PKI dan Angkatan Darat, dengan menyisakan sedikit porsi peran yang tidak berarti untuk partai-partai politik yang ada. Beberapa partai bahkan tidak memiliki cukup daya *survival* berhadapan dengan upaya penyederhanaan kepartaian yang dilakukan oleh Sukarno. Sehingga hanya tersisa sepuluh partai. Masyumi termasuk yang disingkirkan, terutama karena keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemberontakan PRRI. NU lebih mampu bertahan karena sikap akomodatif antara NU dan Sukarno dipertautkan oleh subkultur paternalis, yang walaupun berangkat dari dua budaya (Sukarno, dari budaya Jawa:NU dari budaya pesantren), namun memiliki ciri-ciri yang sama makna kemungkinan defesiasi sosial NU tentang Demokrasi adalah basis kultur pesantren tersebut. Sedangkan defensiasi sosial demokrasi dari tokoh-tokoh Masyumi, kemungkinan berangkat dari literatur dan pemahaman kental yang kontekstual dengan masyarakat Barat yang liberal. Namun, kedekatan NU terhadap Sukarno karena sikap akomodatifnya dipandang oleh Syafii Ma'arif sebagai strategi dasarnya adalah bagaimana menyenangkan Sukarno dan menjaga agar ia bersedia melindungi









































Namun sementara itu muncul sebuah generasi baru NU dengan spesifikasinya sendiri. Mereka bukan kelompok ulama yang dapat digolongkan dalam kubu Situbondo, dan bukan pula kelompok politisi yang tergolong dalam kubu Cipete. Mereka lebih tampak sebagai intelektual yang tampil dengan gagasan-gagasan "jalan tengah", dan karena netralitas mereka dalam polarisasi ulama-politisi itu, gagasan mereka bisa lebih objektif dan relatif mudah diterima semua kalangan NU.

Dalam dasawarsa 70-an orang-orang ini banyak mengadakan diskusi untuk merumuskan langkah-langkah pembaharuan NU. Mereka turut merasakan keprihatinan akan kemunduran NU selama ini, namun tetap menyadari bahwa politik merupakan dimensi yang cukup penting dari aktivitas NU secara keseluruhan, mengingat dalam makna kelahirannya NU pun terkandung nilai-nilai politis. Namun demikian, hubungan NU dengan politik lebih ditentukan oleh sejauh mana persepsi NU tentang politik itu, sehingga persoalannya adalah tentang kualitas politik. Konteks politik semestinya tidak hanya dilihat secara sempit dalam masalah distribusi kekuasaan di DPR misalnya, namun dilihat sebagai upaya mengangkat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam makna demikian, keikutsertaan NU sangat penting artinya, dan





Secara singkat, ketika kelompok ini menyuarakan usulan untuk kembali ke khittah 1926 di Muktamar Semarang, sambutan yang diperoleh tampak mengembirakan. Namun, betapa pun, gagasan kembali ke khittah tetap berada dalam pro-kontra. Orang-orang seperti Idham Chalid dan kelompoknya masih tetap menghendaki politik praktis. Sementara, kalangan non-politis (ulama dan generasi pembaharu NU) mendukung gagasan kembali ke khittah itu.

